

# **PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG (05) LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2025**

**Jalan Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI)  
Jakabaring Palembang  
Email : [palembang@dilmil.org](mailto:palembang@dilmil.org)  
Telpon : (0711)-5620579  
Fax : (0711)-5620579**



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025**

**BAGIAN ANGGARAN 005.05**

**DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Gubernur H. Bastari Komplek OPI Jakabaring Palembang**

**Telp. (0711)-5620579 Fax. (0711)-5620579**

**E-mail : [palembang@dilmil.org](mailto:palembang@dilmil.org)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

---

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 31 Desember 2025  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



Mayor Chk Supriyadi

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	2
Pernyataan Tanggung Jawab .....	3
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	23
A.    Penjelasan Umum.....	23
A.1.    DASAR HUKUM .....	23
A.2.    Profil dan Kebijakan Teknis PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG .....	24
A.3.    Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	25
A.4.    Basis Akuntansi .....	26
A.5.    Dasar Pengukuran .....	26
A.6.    Kebijakan Akuntansi .....	26
B.    Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	35
Selama periode berjalan, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan anggaran belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan ssituasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendaapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut : .....	35
B.1.    Pendapatan Negara dan Hibah .....	35
B.2.    Belanja .....	36
C.    Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	39
C.1.    Aset Lancar .....	39

C.2.	Aset Tetap.....	42
C.5.	Kewajiban Jangka Pendek.....	47
C.6.	Beban yang Masih Harus Dibayar .....	48
C.7.	Ekuitas .....	48
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	49
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	49
D.2.	Beban Pegawai .....	49
D.3.	Beban Persediaan.....	49
D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	50
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	51
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	51
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	52
D.8.	Beban Bantuan Sosial .....	53
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	53
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	54
D.11.	Beban Lain-lain.....	54
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	55
D.13.	Pos Luar Biasa.....	55
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	56
E.1.	Ekuitas Awal.....	56
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	56
E.3.	Penyesuaian Nilai Aset .....	56
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan .....	57
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	57
Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Selisih revaluasi ini merupakan revaluasi BMN/penilaian kembali tanah dan gedung bangunan kantor dan rumah dinas PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG oleh KPKNL Palembang.....		57
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....	57
E.4. 5	Koreksi Lain-lain .....	58

---

E.5. Transaksi Antar Entitas .....	58
E.6. Ekuitas Akhir .....	59
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	60
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	60
F.2. Pengungkapan Lain-lain.....	60
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	60
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual .....	60

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

**PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG****Jalan Gubernur H. Bastari Komplek OPI Jakabaring Palembang****Telp. (0711)-5620579 Fax. (0711)-5620579 E-mail : palembang@dilmil.org**

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 31 Desember 2025  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



Mayor Chk Supriyadi

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG Semester II Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA. 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA. 2025 adalah sebesar Rp. 201.137.635,- atau mencapai 97,23 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 206.878.000,-.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Semester II TA. 2025.

Nilai Aset Semester II TA. 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyesuaian piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 220.427.635,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (220.427.635,-), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp.(220.427.635,-).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp.287.000,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (220.427.635,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 220.140.635,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 0,-.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode Semester II TA. 2025, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2025			TA 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	0	0	0
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	206.878.000	201.137.635	97.23	169.764.713
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>206.878.000</b>	<b>201.137.635</b>	<b>97.23</b>	<b>169.764.713</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**  
**NERACA**  
**Semester II TA. 2025 DAN 2024**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025	2024
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>		<b>C.1</b>	
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	0	287.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>0</b>	<b>287.000</b>
<b>Aset Tetap</b>		<b>C.2</b>	
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2. 4.	0	0
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aset Lainnya</b>		<b>C.3.</b>	
Aset Tak Berwujud	C.3. 1.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 2.	0	0
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>0</b>	<b>287.000</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			<b>287.000</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>C.5</b>	
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5. 1.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**EKUITAS**

Ekuitas	0	287.000
Jumlah Ekuitas	0	287.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	0	287.000

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Semester II TA. 2025 DAN 2024**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025	2024
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	0	0
<b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	42.129.500	40.980.788
Beban Barang dan Jasa	D. 4	78.512.510	48.865.500
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	99.785.625	102.083.213
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>220.427.635</b>	<b>191.929.501</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(220.427.635)</b>	<b>(191.929.501)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>D 12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beban dari Kegiatan non operasional lainnya	D. 13	0	0
<b>Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(220.427.635)</b>	<b>(191.929.501)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	<b>D. 14</b>		
<b>Pendapatan PNB</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban Persediaan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>		<b>(220.427.635)</b>	<b>(191.929.501)</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Semester II TA. 2025 DAN 2024**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	2025	2024
Ekuitas Awal	E. 1	287.000	1.175.500
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(220.427.635)	(191.929.501)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	220.140.635	191.041.001
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 5	(287.000)	(888.500)
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>E. 6</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

## **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu:

" Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang Yang Agung "

Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer I-04 Palembang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang,  
hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :
  - Meningkatkan kualitas putusan hakim
  - Mempercepat penyelesaian perkara
  - Menguasai Standar Operation Procedure (SOP) sesuai bidang masing-masing
  - Pengawasan yang berkualitas
  - Menerapkan reward dan punishment untuk mengontrol kinerja
  - Dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja
2. Meningkatkan kualitas publik, hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :
  - Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
  - Meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi informasi untuk pelayananan Publik
  - Mengembangkan sistem informasi perkara

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tandar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut:

#### a. Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### b. Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### c. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### d. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### e. Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal 1n1 diwujudkan dengan membentuk penyisihan pi utang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas pi utang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

<b>Kurang Lancar</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	<b>10%</b>
<b>Diragukan</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	<b>50%</b>
<b>Macet</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</li> <li>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	<b>100%</b>

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, dipelakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 118/PMK.06/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan dan jembatan dan bangunan air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2019 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan keuangan
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
  - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.
  - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan at as ATB dengan mas a manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/ KM.6/ 2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	5
Franchise	10
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	20
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	25
	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku	70

Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## 6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## 7. Ekuitas

---

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan anggaran belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
<b>BELANJA</b>		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	276.470.000	206.878.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	276.470.000	206.878.000

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah : Rp.0*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

#### Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Semester II TA. 2025 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	0	0	0
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester II TA. 2025 sebesar Rp.0 atau 0 persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Militer tidak memiliki PNBP.

Perbandingan realisasi PNBP Semester II TA. 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP Semester II TA. 2025 dan 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	2024	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	0	0	0	0
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B.2. Belanja

*Realisasi  
Belanja Negara  
: Rp.  
169.764.713*

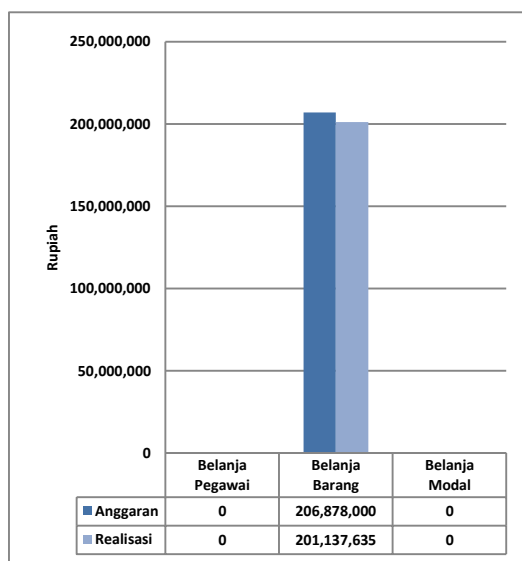
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Militer I-04 Palembang Semester II TA. 2025 adalah sebesar Rp 169.764.713,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 98 persen dari anggaran senilai Rp. 172.680.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA. 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	206.878.000	201.137.635	97,23
Belanja Modal	0	0	0
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>206.878.000</b>	<b>201.137.635</b>	<b>97,23</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>206.878.000</b>	<b>201.137.635</b>	<b>97,23</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA. 2025**  
(dalam satuan Rupiah)



*Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2021*

Realisasi Belanja Negara tahun anggaran 2025 turun dibandingkan pada tahun anggaran 2024 yaitu masing-masing sebesar Rp. 201.137.635 dan 169.764.713 dari jumlah anggaran Rp. 206.878.000,- dan 172.680.000,- dalam persentase sebesar 97,23 persen dan 98,31 persen. Hal ini dikarenakan untuk belanja saksi ahli dan pemeriksaan barang bukti belum sepenuhnya terealisasi mengingat sesuai dengan kebutuhan penyelesaian perkara yang masuk belum memerlukan saksi ahli dan pemeriksaan barang bukti diluar gedung.

Perbandingan realisasi belanja Semester II TA. 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA. 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	TA 2024	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	201.137.635	169.764.713	31.372.922	18,48 %
Belanja Modal	0	0	0	0
<b>Total Belanja</b>	<b>201.137.635</b>	<b>169.764.713</b>	<b>(31.372.922)</b>	<b>18.48 %</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi  
Belanja  
Pegawai : Rp.0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Militer I-04 Palembang per 31 Desember 2025 pada Semester II TA. 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA. 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

### B.2.2. Belanja Barang

Realisasi  
Belanja Barang :  
Rp. 201.137.635

Realisasi Belanja Barang PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG per 31 Desember TA. 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 201.137.635 dan Rp. 169.764.713 . Realisasi Belanja Barang Semester II TA. 2025 mengalami penurunan, namun pagu anggaran mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada semester II TA. 2024.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember Semester II TA. 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja barang pengiriman surat dinas pos pusat	13.362.510	14.414.500	(1.051.990)	(7,3)
Belanja bahan	48.950.000	30.251.000	18.699.000	61,81
Belanja barang persediaan barang konsumsi	22.839.500	18.816.000	4.023.500	21,38
Belanja Jasa Profesi	9.000.000	3.000.000	6.000.000	200

Belanja Jasa Lainnya	1.200.000	1.200.000	0	0
Belanja perjalanan dinas dalam kota	0	2.700.000	(2.700.000)	(100)
Belanja perjalanan biasa	99.785.625	99.383.213	402.412	0,4
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>201.137.635</b>	<b>169.764.713</b>	<b>31.372.922</b>	<b>18,48</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>201.137.635</b>	<b>169.764.713</b>	<b>31.372.922</b>	<b>18,48</b>

### B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi  
Belanja Modal :  
Rp. 0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Militer I-04 Palembang Semester II TA. 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Perbandingan Belanja Modal Semester II TA. 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	TA 2024	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar:  
Rp. 0*

Nilai Aset Lancar Semester II TA. 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 287.000,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Semester II TA. 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah:

**Rincian Aset Lancar Semester II TA. 2025 dan 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	TA 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	0	287.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>

### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp. 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2025	TA 2024
1	Kwitansi yang belum dipertanggungjawabkan	0	0
2	Uang tunai pada brankas Bendahara	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar di Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah

dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

**Rincian Belanja Dibayar di Muka**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2025	TA 2024
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.1.3. Persediaan

*Persediaan:  
Rp. 0*

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 287.000,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Persediaan per 31 Desember 2025 dan TA 2024**

No.	Uraian	31 Desember 2025	TA 2024
1	Barang Konsumsi	0	287.000
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3	Persediaan lainnya	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>

Semua persediaan pada saat tanggal pelaporan dalam kondisi baik sebagaimana terdapat dalam opname fisik nomor 05/SEKPM/W1-Mil04/PL1/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Saldo awal	:	287.000
Pembelian	:	22.839.500
Pemakaian	:	23.126.500
Sisa akhir	:	0

### C.1.4. Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Persediaan yang belum diregister merupakan persediaan yang sudah dibeli dan dicatat di aplikasi persediaan tetapi belum dipertanggungjawabkan pada Bendahara Pengeluaran Semester II TA. 2025.

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp. 0* Nilai Aset Tetap Semester II TA. 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Semester II TA. 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

#### Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	2024	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

### C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp. 0* Nilai Aset Tetap berupa Tanah Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

### Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.						
2.						
Jumlah		-	-	-	-	-

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan  
Mesin : Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang	0
Penghentian aset dari penggunaan	0
Saldo Semester II TA. 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	0

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan : Rp. 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah	0
Koreksi nilai tim penertiban aset	0
Mutasi Kurang	0
Koreksi semu hasil penilaian kembali	0
Saldo Semester II TA. 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	0

### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp.0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 .

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Semester II TA. 2025	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo Semester II TA. 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	0

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai

perolehan Aset Tetap Lainnya Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	0
<b>Mutasi Tambah</b>	
Transfer Masuk	0
<b>Mutasi Kurang</b>	
Transfer Keluar	0
<b>Saldo Semester II TA. 2025</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	0

#### **C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan**

*Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

#### **C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

*Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester II TA. 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.2.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Semester II TA. 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
<b>Saldo Semester II TA. 2025</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025	0

### C.4.1. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :  
Rp. 0*

Saldo aset lain-lain Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Militer I-04 Palembang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2025	0
----------------------------	---

Mutasi Tambah	0
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Mutasi Kurang	0
<b>Saldo Semester II TA. 2025</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
<b>Nilai Buku 31 Desember 2025</b>	<b>0</b>

## C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 0*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Semester II TA. 2025 disajikan pada tabel di bawah :

**Rincian Kewajiban Jangka Pendek Semester II TA. 2025 dan 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	TA 2024
Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak Ketiga: Rp 0*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG per tanggal 31 Desember 2025 pelaporan adalah sebagai berikut:

**Rincian Utang kepada Pihak Ketiga**

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Utang kepada pihak ketiga	Rp 0	

### C.5.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka  
dari  
KPPN:  
Rp. 0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

### C.6. Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar:  
Rp. 0*

Beban yang Masih Harus Dibayar Semester II TA. 2025 dan 2024 sebesar Rp.0 dan Rp.0. merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

#### Rincian Kewajiban Jangka Pendek Semester II TA. 2025 dan 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	TA 2024
	NIHIL	
Jumlah		

### C.7. Ekuitas

*Ekuitas:  
Rp. 0*

Ekuitas Semester II TA. 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 287.000,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

**Pendapatan PNBPNP :** Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan tersebut terdiri dari:  
**Rp.0.**

**Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP Semester II TA. 2025 TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
		0	0	0
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### D.2. Beban Pegawai

**Beban Pegawai :** Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.  
**Rp.0**

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Rincian Beban Pegawai per 31 Desember SEMESTER II TA. 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Pegawai	0	0	0	0
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### D.3. Beban Persediaan

**Beban Persediaan :** Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 42.129.500,- dan Rp. 40.980.788,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.  
**Rp. 40.980.788**

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan per 31 Desember SEMESTER II TA. 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	SEMESTER II TA. 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	42.980.788	40.980.788	2.000.000	4,89
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>42.980.788</b>	<b>40.980.788</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4,89</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa : Rp 78.512.510*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 78.512.510,- dan Rp. 48.865.500,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Jasa Semester II TA. 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	19.362.510	14.414.500	4.948.010	34,33
Beban Bahan	48.950.000	30.251.000	18.699.000	61,81
Beban Jasa Profesi	9.000.000	3.000.000	6.000.000	200
Beban Jasa Lainnya	1.200.000	1.200.000	0	0
<b>Total Beban Barang Jasa</b>	<b>78.512.510</b>	<b>48.865.500</b>	<b>29.647.010</b>	<b>60,67</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan: Rp 0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA. 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas : Rp. 102.083.213,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 99.785.625,- dan Rp. 102.083.213,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember SEMESTER II TA. 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	99.785.625	99.383.213	402.412	0,4
Beban Perjalanan Dinas dalam	0	2.700.000	(2.700.000)	(100)

Kota				
Beban Perjalanan Dinas Paket	0	0	0	0
Meeting dalam Kota				
Beban Perjalanan Dinas Paket	0	0	0	0
Meeting luar Kota				
Pengembalian belanja	0	0	0	0
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>99.785.625</b>	<b>102.083.213</b>	<b>(2.297.588)</b>	<b>3,58</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
per 30 Juni SEMESTER II TA. 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial  
per 31 Desember SEMESTER II TA. 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember SEMESTER II TA. 2025 dan TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan	0	0	0	0

dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Lisensi	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 31 Desember SEMESTER II TA. 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	SEMESTER II TA. 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain : Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain per 31 Desember SEMESTER II TA. 2025 dan TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	SEMESTER II TA. 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya				
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Kegiatan Non Operasional :*  
*Rp. 0,-*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

### Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember SEMESTER II TA. 2025 dan TA 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Pendapatan pelepasan aset non lancar	0	0	0	0
Beban pelepasan aset non lancar	0	0	0	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
<b>Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa :*  
*Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode

yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pos Luar Biasa**  
**per 31 Desember SEMESTER II TA. 2025 dan TA 2024**  
*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.287.000,- dan Rp. 1.175.500,-

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. (220.427.635) dan Rp. (191.929.501). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 31 Desember SEMESTER II TA. 2025  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Selisih revaluasi ini merupakan revaluasi BMN/penilaian kembali tanah dan gedung bangunan kantor dan rumah dinas PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG oleh KPKNL Palembang.

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

#### Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Software	0

Jumlah 0

### E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 koreksi ini merupakan koreksi atas beban pemakaian bulan Desember 2025 yang belum diakrualkan pada pada laporan akhir tahun 2025. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 31 Desember SEMESTER II TA. 2025  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

### E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 220.140.635,- dan Rp. 191.041.001,-. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 31 Desember SEMESTER II TA. 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	220.140.635
Transfer keluar	0
Transfer masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>220.140.635</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0.

#### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0 terdiri dari:

Nama satker	Transfer keluar	Transfer masuk
Pengadilan Militer I-04 Palembang	0764	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
<b>Total Pengesahan</b>		<b>0</b>
<b>Pengesahan Pengembalian Hibah</b>		<b>0</b>

## E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 287.000,-.

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

#### **F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

---

Tidak ada temuan BPK yang dapat diungkapkan dalam laporan keuangan tahun ini maupun Semester lalu.

#### **F.2.2. Rekening Pemerintah**

---

Rekening BRI Cabang A Rivai Palembang A/C 651556632121000 a.n. BPG 014 DILMIL I-04 PALEMBANG 01 yang digunakan sebagai Penampung Kas Bendahara Pengeluaran DIPA Badan Peradilan Militer dan TUN.

#### **F.2.3. Revisi DIPA**

---

Sampai periode 31 Desember 2025 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG melakukan revisi DIPA sebanyak 8 kali, revisi yang pertama yaitu pada tanggal 21 Februari 2025, revisi yang kedua pada tanggal 21 Maret 2025, revisi yang ketiga pada tanggal 21 April 2025, revisi yang keempat pada tanggal 15 Juli 2025, revisi yang kelima pada tanggal 21 Agustus 2025, revisi yang keenam pada tanggal 11 Septembe 2025, revisi ketujuh pada tanggal 16 Oktober 2025 dan revisi yang kedelapan pada tanggal 24 Oktober 2025.

#### **F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Per tanggal 31 Desember 2025 tidak terdapat ralat SPM .

#### **F.2.5. Catatan Penting Lainnya**

---

Tidak ada catatan penting lainnya Semester II TA. 2025.

DRAFT

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
**ESELON I** : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN  
**SATUAN KERJA** : ( 663212 ) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Tgl Data : 20/02/26 2:19 AM

Tgl Cetak : 20/02/26 8:47 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	42,129,500	40,980,788	1,148,712	2.803
Beban Barang dan Jasa	78,512,510	48,865,500	29,647,010	60.671
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	99,785,625	102,083,213	(2,297,588)	(2.251)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
**ESELON I** : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN  
**SATUAN KERJA** : ( 663212 ) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Tgl Data : 20/02/26 2:19 AM

Tgl Cetak : 20/02/26 8:47 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>220,427,635</b>	<b>191,929,501</b>	<b>28,498,134</b>	<b>14.848</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(220,427,635)</b>	<b>(191,929,501)</b>	<b>(28,498,134)</b>	<b>14.848</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(220,427,635)</b>	<b>(191,929,501)</b>	<b>(28,498,134)</b>	<b>14.848</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(220,427,635)</b>	<b>(191,929,501)</b>	<b>(28,498,134)</b>	<b>14.848</b>

---

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 20 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21950303390275

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : ( 663212 ) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Tgl Data : 20/02/26 6:39 AM

Tgl Cetak : 20/02/26 8:48 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	287,000	1,175,500	(888,500)	(75.58)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(220,427,635)	(191,929,501)	(28,498,134)	14.85
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	220,140,635	191,041,001	29,099,634	15.23
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(287,000)	(888,500)	601,500	(67.7)
EKUITAS AKHIR	0	287,000	(287,000)	(100)

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 20 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21950303390275



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG 005  
**ESELON I** : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05  
**SATUAN KERJA** : PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG 663212

Tgl Data : 20/02/26 2:19 AM  
Tgl Cetak : 20/02/26 8:48 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>206,878,000</b>	<b>201,137,635</b>	<b>(5,740,365)</b>	<b>97.23</b>	<b>172,680,000</b>	<b>169,764,713</b>	<b>(2,915,287)</b>	<b>98.31</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 20 Februari 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21950303390275

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG**

**UNIT ORGANISASI : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN**

**SATUAN KERJA : ( 663212 ) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG**

Tgl Data : 20/02/26 2:19 AM

Tgl Cetak : 20/02/26 8:48 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	0	287,000	(287,000)	(100.00)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>0</b>	<b>287,000</b>	<b>(287,000)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>0</b>	<b>287,000</b>	<b>(287,000)</b>	<b>(100.00)</b>

<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	0	287,000	(287,000)	(100.00)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>0</b>	<b>287,000</b>	<b>(287,000)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>0</b>	<b>287,000</b>	<b>(287,000)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>0</b>	<b>287,000</b>	<b>(287,000)</b>	<b>(100.00)</b>

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 20 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21950303390275

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : ( 663212 ) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Tgl Data : 20/02/26 2:19 AM

Tgl Cetak : 20/02/26 8:48 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	201,137,635
0.0	313221	Transfer Masuk	0	19,003,000
0.0	391111	Ekuitas	0	287,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,362,510	0
3.0	521211	Beban Bahan	48,950,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	9,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,200,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	99,785,625	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	42,129,500	0
JUMLAH			220,427,635	220,427,635

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 20 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21950303390275

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : ( 1100 ) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : ( 663212 ) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Tgl Data : 20/02/26 6:39 AM

Tgl Cetak : 20/02/26 8:48 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	201,137,635
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,362,510	0
3.0	521211	Belanja Bahan	48,950,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,839,500	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	9,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,200,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99,785,625	0
JUMLAH			201,137,635	201,137,635

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Palembang, 20 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, S.H., M.H.

21950303390275

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 005                   **MAHKAMAH AGUNG**  
**ESELON I** : 05                               **Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 1100               **SUMATERA SELATAN**  
**SATUAN KERJA** : 663212               **PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG**  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 27/01/26 2:19 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker\_poc  
Tgl Data : 27/1/26 10:21 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	48,600,000	19,795,000	19,362,510	0	19,362,510	97.82	432,490
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	48,600,000	19,795,000	19,362,510	0	19,362,510	97.82	432,490
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	84,120,000	51,536,000	48,950,000	0	48,950,000	94.98	2,586,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	84,120,000	51,536,000	48,950,000	0	48,950,000	94.98	2,586,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12,150,000	22,847,000	22,839,500	0	22,839,500	99.97	7,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	12,150,000	22,847,000	22,839,500	0	22,839,500	99.97	7,500
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	10,800,000	10,800,000	9,000,000	0	9,000,000	83.33	1,800,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	12,000,000	12,000,000	10,200,000	0	10,200,000	85	1,800,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99,800,000	99,800,000	99,785,625	0	99,785,625	99.99	14,375
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,800,000	900,000	0	0	0	0	900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	119,600,000	100,700,000	99,785,625	0	99,785,625	99.09	914,375
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	276,470,000	206,878,000	201,137,635	0	201,137,635	97.23	5,740,365
	JUMLAH BELANJA	276,470,000	206,878,000	201,137,635	0	201,137,635	97.23	5,740,365

## KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

### Tingkat Satker (Non BLU)

Periode : Semester II Tahun 2025 (*Unaudited*)

Kode Satker : 663212  
 Nama Satker : Pengadilan Militer I-04 Palembang  
 Nama Eselon 1 : Direktorat Jendral Badilmiltun  
 Nama Kementerian : Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>		
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
		<b>Seharusnya</b>
1. LRA <i>face</i> per 31 Desember 2025	√	Ada
2. Neraca per 31 Desember 2025	√	Ada
3. Laporan Operasional per 31 Desember 2025	√	Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025	√	Ada
5. Catatan atas laporan Keuangan	√	Ada
<b>Lampiran Pendukung Laporan Keuangan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
		<b>Seharusnya</b>
1. Laporan yang dihasilkan oleh Aplikasi	√	Ada
2. Laporan Kuasa Pengguna barang	√	Ada
3. Daftar Rekening Pemerintah	√	Ada
4. Memo Penyesuaian atas Jurnal Penyesuaian/Umum di SAIBA	√	Ada
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>		
<b>Persamaan dasar akuntansi</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>
		<b>Seharusnya</b>
1. Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	√	Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca	√	Sama
3. Aset = Kewajiban + Ekuitas	√	Sama
<b>KESESUAIAN MIGRASI SALDO AWAL</b>		
	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>
		<b>Seharusnya</b>
1. Saldo Awal Aset 2025 = Total Aset Audited 2024	√	Sama
2. Saldo Awal Kewajiban 2025 = Total Kewajiban Audited 2024 - Pendapatan Ditanggunghkan + Akun 219671	√	Sama
3. Saldo Awal Ekuitas 2025 = Total Ekuitas Dana Audited 2024 + Pendapatan Ditanggunghkan - Akun 219671	√	Sama
<b>NERACA PERCOBAAN</b>		
<b>Pengecekan Saldo Tidak Normal</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
		<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya		√ Tidak

<b>Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)</b>	<b>Ya</b>	<b>tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah Akun Aset (1xxxx) bersaldo (D) <i>(kec.Penyisihan dan Akumulasi)</i>	√		Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
4. Apakah Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5. Apakah Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K) <i>(kec.Pengembalian Pendapatan)</i>	√		Ya
6. Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
7. Apakah Akun Belanja/beban (5xxxx) bersaldo (D) <i>(kecuali Beban Penyisihan Piutang)</i>	√		Ya
8. Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun 219671 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)		√	Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) <i>Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI</i>		√	Tidak
3. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan)		√	Tidak
8. Adakah akun 423956 (Penerimaan kembali belanja hibah TAYL)		√	Tidak
9. Adakah akun 423958 (Penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL)		√	Tidak
4. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		√	Tidak
5. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		√	Tidak
6. Adakah akun 525xxx (Belanja barang BLU)		√	Tidak
7. Adakah akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
8. Adakah akun "yang belum diregister"		√	Tidak
9. Adakah akun-akun lainnya yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs.			Tidak
<b>Hibah Langsung</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) maka ada akun			
1. 218211 (Hibah Langsung Yang belum disahkan), dengan nilai maksimal sama, bisa lebih kecil.	√		Ya
2. akun 218211 di kredit	√		Ya
<b>Pengecekan akun tertentu</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah Akun 391119 (Koreksi Lainnya)		√	Tidak
<i>Jika ada, uraikan dalam lampiran, Jurnal SAIBA yang dibuat dan penyebabnya.</i>			
2. Adakah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset lainnya)		√	Ada/tidak
<i>Akun ini jarang terjadi, jika ada, pastikan kebenarannya dan pastikan Jurnal kiriman dari Persediaan/SIMAK</i>			
<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>			
<b>Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah pendapatan Perpajakan		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
<b>Pengecekan saldo Normal</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
<i>Seluruh Nilai Normal Akun LO adalah Positif, kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif</i>			
9. Kegiatan Operasional	<b>Positif</b>	<b>Negatif</b>	<b>Seharusnya</b>

- Pendapatan	√		Positif
- Beban Pegawai	√		Positif
- Beban Persediaan	√		Positif
- Beban Barang dan Jasa	√		Positif
- Beban Pemeliharaan	√		Positif
- Beban Perjalanan Dinas	√		Positif
- Beban Barang Untuk Diserahkan kpd Masyarakat	√		Positif
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	√		Positif
- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	√		Pos/Neg

<b>10. Kegiatan Non Operasional</b>	<b>Positif</b>	<b>Negatif</b>	<b>Seharusnya</b>
- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	√		Positif
- Beban Pelepasan Aset non Lancar	√		Positif
- Pendapatan Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang	√		Positif
- Beban Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang	√		Positif
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	√		Positif
- Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya			Positif

<b>Pengecekan antar laporan</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
11. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat/bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx/57xxxx?	√		Ya

*Jika tidak ada realisasi akun 526xxx, kemungkinannya hanya dari pembelian Materai, atau pembelian tahun lalu, penyerahan tahun berjalan.*

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<b>Pengecekan akun tertentu</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"	√		Ada
2. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?		√	Tidak

*Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP dan Jurnal kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK*

*Akun-akun pada LPE "terkadang" digunakan untuk pasangan jurnal yang tidak seharusnya (misal: untuk menghilangkan "belum diregister", menyamakan dengan L-BMN, dll), dengan demikian agar dilakukan penelaahan mendalam terhadap jurnal yang melibatkan akun-akun ini.*

### NERACA

<b>Pengecekan Persamaan Akuntansi</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Sama

<b>Pengecekan Akun tertentu</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah akun "Pendapatan yang ditangguhkan" ?		√	Tidak

<b>Pengecekan Keterkaitan Transaksi</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			

1. Ada Akun Piutang maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang		√	Ada/Tidak
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ada/Tidak
2. Ada Piutang jangka Panjang (TP/TGR)			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ada/Tidak
3. Ada persediaan maka akan ada akun:			Ada/Tidak

Beban Persediaan (di LO)	√		Ada/Tidak
- Penyesuaian Nilai Aset (di LPE)		√	Ada/Tidak
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL		√	Ada/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ada/Tidak
<b>Pengecekan Apakah sudah melakukan Jurnal Akrua</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada pendapatan diterima Dimuka		√	Ada/Tidak
2. Ada realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka		√	Ada/Tidak
3. Ada realisasi belanja Jasa Listrik di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar		√	Ada/Tidak

### TELAAH KESESUAIAN DENGAN LAP. BMN (APLIKASI PERSEDIAAN & SIMAK)

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Persediaan	√		Sama
2. Aset Tetap	√		Sama
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	√		Sama
4. Aset Lainnya	√		Sama
5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	√		Sama

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Beban Penyusutan 591xxx (SAIBA) dengan kolom 7 (SIMAK)	√		Sama
2. Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan kolom 9 (SIMAK)	√		Sama

*Semenjak menggunakan basis Akrua, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi SAIBA. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan di Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN, apakah input sudah menggunakan menu yang sesuai atau belum.*

	Sesuai	Belum	Seharusnya
- Aplikasi Persediaan (Menu Laporan - Daftar Transaksi Persediaan)	N/A	N/A	
- Aplikasi SIMAK-BMN (Menu Buku/Daftar - Daftar Transaksi BMN)	N/A	N/A	

Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK. Periksa di Aplikasi SAIBA, Laporan Buku Besar Akrua per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK: selain SALDO atau JRNBMN

Adakah selain JNS DOK: SALDO atau JRNBMN atas akun-akun dibawah ini?	Ya	Tidak	Seharusnya
Akun 313211 (transfer keluar) <i>kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC</i>		√	Tidak
Akun 313221 (transfer masuk) <i>kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC</i>		√	Tidak
Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)		√	Tidak
Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)		√	Tidak
Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)		√	Tidak
Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)		√	Tidak
akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Tidak
Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)		√	Tidak
Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)		√	Tidak

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA (LRA/B)

	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Adakah saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2 Ada uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> "		√	Tidak
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>			
Kesesuaian antara ADK, Face Laporan dan CaLK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKCL (Neraca Percobaan)	√		Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK			
	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah akun "Hibah yang belum Disahkan" telah dijelaskan?	√		Ya
3. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai dengan SAP/PMK 177/2015 ?	√		Ya
4. Apakah semua akun di LO dan LPE telah dijelaskan?	√		Ya
Pengungkapan Penting Lainnya			
	Ya	Tidak	Seharusnya
5. Untuk KL Likuidasi: Apakah perubahan Manajemen telah diungkapkan?	√		Ya
6. Adakah Pengungkapan lainnya sesuai karakteristik masing-masing KL <i>(misalnya: Status Tuntutan Hukum Pihak Ketiga (Incrakht, penganggaran), Barang Bukti, dll)</i>	√		Ya

Mengetahui Pejabat Penyusun LKCL,  Mayu: Chik Supriyadi	Palembang, 31 Desember 2025 Penelaah,  Srilanjari
--	--